

Pemangkasan Anggaran Berisiko Tekan Konstruksi

Pemangkasan anggaran Kementerian PU berpotensi menekan kontribusi sektor konstruksi terhadap perekonomian. Perlu dicari solusi agar proyek infrastruktur tetap berjalan.

JAKARTA, KOMPAS — Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum atau PU berpotensi menurunkan kontribusi sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 dan tahun-tahun berikutnya.

Selain itu, pemangkasan anggaran ini juga dikhawatirkan akan menyebabkan terhentinya berbagai proyek infrastruktur, yang pada akhirnya berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK bagi pekerja konstruksi.

"Sektor konstruksi memiliki peran besar dalam perekonomian kita. Sektor ini menyerap banyak tenaga kerja, baik dalam proyek infrastruktur yang didanai pemerintah maupun swasta," kata Ketua Umum Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Erie Heriyadi saat dihubungi, Minggu (9/2/2025).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), distribusi dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), menurut lapangan usaha pada triwulan IV-2024, menunjukkan bahwa sektor konstruksi masuk dalam lima besar penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi sebesar 10,43 persen. Selain itu, industri konstruksi mencatat pertumbuhan sebesar 5,81 persen (year on year/year) pada periode yang sama.

Menurut Erie, sektor konstruksi pada 2025 akan menghadapi tantangan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Tidak tertutup kemungkinan, kontribusi sektor ini terhadap perekonomian akan mengalami penurunan.

Selain itu, pemangkasan anggaran diperkirakan akan berdampak pada proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan sehingga berisiko membuat jutaan tenaga kerja yang terkait sektor konstruksi akan kehilangan pekerjaan.

"Dampaknya tidak hanya pada penurunan kontribusi sektor konstruksi terhadap PDR tetapi juga pada lapangan kerja. Kami khawatir banyak pekerja di sektor konstruksi akan mengalami PHK. Kami memprediksi sekitar 2,1 juta tenaga kerja yang terkait sektor konstruksi berisiko menganggur," kata Erie.

Lebih lanjut, Erie menjelaskan bahwa dampak pemangkasan anggaran juga akan dirasakan pada rantai pasok sektor konstruksi, termasuk pekerja di pabrik atau produsen yang memasok bahan material untuk proyek infrastruktur.

Jika proyek pembangunan terhambat atau bahkan terhenti, distribusi bahan bangunan juga akan ikut terganggu.

"Terhambatnya produksi bahan baku di pabrik akibat stagnasi proyek akan berdampak langsung pada tenaga kerja di sektor ini. Para pekerja pabrik dan produsen bahan bangunan pun berisiko mengalami PHK," ujar Erie.

Seperti diketahui, pagu anggaran Kementerian PU untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 telah disepakati oleh Komisi V DPR sebesar Rp 29,57 triliun. Pagu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian PU yang awalnya mencapai Rp 110,95 triliun telah mengalami efisiensi sebesar Rp 81,38 triliun. Dengan demikian, sisa

anggaran yang tersedia adalah Rp 29,57 triliun, yang terdiri atas nonrupiah murni sebesar Rp 16,31 triliun dan rupiah murni sebesar Rp 13,26 triliun.

Erie menilai, kebijakan ketahanan pangan melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak seharusnya dilakukan dengan mengorbankan sektor produktif lainnya. Ia mengingatkan agar kebijakan pemangkasan anggaran tidak justru memperburuk kondisi ekonomi nasional yang tengah berupaya bangkit.

"Efisiensi anggaran di sejumlah kementerian, termasuk Kementerian PU, berdampak pada berbagai sektor. Jangan sampai anak-anak mendapatkan makanan bergizi gratis, tetapi pada saat yang sama, orang tua mereka, khususnya para pekerja konstruksi, harus mengalami PHK karena tidak lagi terserap di sektor tersebut. Ini adalah ironi," kata Erie.

Sementara itu, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) sekaligus Ketua Forum Komunikasi Jasa Konstruksi Indonesia (FKJKI) Andi Rukman Karumpa mengatakan, perlu ada jalan keluar dan solusi dari pemerintah agar efek domino dari kebijakan pemangkasan anggaran tidak menimbulkan banyak korban PHK.

Pemerintah harus memberikan kepastian investasi dari swasta baik dalam dan luar negeri untuk menutupi kekurangan anggaran dan keberlanjutan proyek pembangunan infrastruktur tidak mangkrak.

FKJKI juga mengusulkan relaksasi regulasi guna mem-

permudah akses pendanaan dan perizinan proyek infrastruktur.

Selain itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dapat diintegrasikan dengan sektor konstruksi. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan UMKM konstruksi daerah dalam mendukung pengadaan infrastruktur yang berkaitan dengan program MBG. FKJKI menegaskan komitmennya bahwa pelaku usaha konstruksi siap membakung upaya pemerintah dalam mencapai swasembada pangan.

"Pemerintah harus memastikan proyek-proyek yang sedang berjalan tidak terhenti akibat efisiensi anggaran. Hal ini sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi serta mempercepat pembangunan infrastruktur sebagai fondasi pembangunan nasional," ujarnya.

Tidak mengganggu

Menteri PU Dody Hanggoda, dalam keterangan resminya, menyatakan bahwa program pembangunan infrastruktur Kementerian PU untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 telah disusun dengan baik. Oleh karena itu, efisiensi anggaran tidak akan mengganggu apalagi menghentikan proyek infrastruktur yang tengah berjalan.

Ia menegaskan bahwa besarnya anggaran bukanlah tujuan utama kementeriannya. Kementerian PU berpegang pada dua target utama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjalankan tugas sesuai arahan Presiden, berapa pun anggaran

yang dialokasikan.

"Kementerian PU sudah terbiasa membangun. Target utama kami adalah memastikan setiap proyek yang dimulai harus diselesaikan. Tidak boleh ada yang mangkrak karena itu bukan pakem kami," ujar Dody.

Kementerian PU akan mengoptimalkan anggaran yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan dan DPR secara efektif, transparan, dan akuntabel. Tujuannya adalah memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan tanpa menguragkan kualitas serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

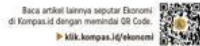
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo mengatakan, anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan perumahan membutuhkan dana besar. Namun, jika pemerintah menjalankan kebijakan seperti biasa tanpa efisiensi, maka akan sulit untuk mencapainya.

"Mau tidak mau, kita harus melakukan efisiensi dan realokasi anggaran dari hal-hal yang efek multiplikasinya kurang ke sektor yang efeknya lebih tinggi," ujarnya.

Drajad menegaskan bahwa efisiensi ini bukan berarti memangkas semua pos anggaran. Misalnya, perjalanan dinas tetap diperlukan dalam konteks pengawasan anggaran.

Menurut Drajad, dalam kebijakan efisiensi ini, pemerintah berusaha menyeimbangkan kebutuhan anggaran untuk program prioritas dengan dampaknya terhadap sektor lain.

(GKH)



Pembuatan Celengan Cipsum



Tasdan menerima celengan yang terbuat dari pipam di rumahnya yang merupakan sebagai ruang kerjanya di kawasan Cipang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (9/2/2025). Tasdan, yang mengaku telah menekuni usaha pembuatan celengan cipsum selama 30 tahun terakhir ini, menjadikan dagangannya secara keliling dari rumah ke rumah. Karangnya informasinya ia terima menyebarkannya belum memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasarnya.

Pemangkasan Anggaran Berisiko Tekan Konstruksi

Pemangkasan anggaran Kementerian PU berpotensi menekan kontribusi sektor konstruksi terhadap perekonomian. Perlu dicari solusi agar proyek infrastruktur tetap berjalan.

JAKARTA, KOMPAS — Pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KEMPU) untuk PU berpotensi mengurangi kontribusi sektor konstruksi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Selain itu, pemangkasan anggaran ini juga diawatirkan akan menyebabkan terhentanya berbagai proyek infrastruktur yang pada akhirnya berdampak pada pemenuhan kebutuhan kerja atau PHK bagi pekerja konstruksi.

Selain itu, pemangkasan anggaran diperkirakan akan berdampak pada proyek-proyek infrastruktur yang telah direncanakan sebagai bentuk membuat jalan tenaga kerja yang terkait sektor konstruksi akan kelangkaan. "Dampaknya tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan sektor konstruksi terhadap PDR tetapi juga pada lapangan kerja. Kami khawatir banyak pekerja di sektor konstruksi akan mengalami PHK. Kami memperkirakan sekitar 2,1 juta tenaga kerja yang terkait sektor konstruksi berisiko menganggur," kata Eric.

Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) adalah bagian dari infrastruktur yang telah direncanakan sebagai bentuk membuat jalan tenaga kerja yang terkait sektor konstruksi akan kelangkaan. "Dampaknya tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan sektor konstruksi terhadap PDR tetapi juga pada lapangan kerja. Kami khawatir banyak pekerja di sektor konstruksi akan mengalami PHK. Kami memperkirakan sekitar 2,1 juta tenaga kerja yang terkait sektor konstruksi berisiko menganggur," kata Eric.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor konstruksi terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), menurut laporan usaha pada triwulan IV-2024, menunjukkan bahwa sektor konstruksi masih dalam lima besar penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusi sebesar 10,4 persen. Selain itu, industri konstruksi mencatat pertumbuhan sebesar 8,81 persen (year on year/2024) pada periode yang sama.

Menurut Eric, sektor konstruksi pada 2025 akan menghadapi tantangan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Tidak tertutup kemungkinan, kontribusi sektor ini terhadap perekonomian akan mengalami penurunan.

Menurut Eric, sektor konstruksi pada 2025 akan menghadapi tantangan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Tidak tertutup kemungkinan, kontribusi sektor ini terhadap perekonomian akan mengalami penurunan.

KEUANGAN

Dirjen Anggaran Tersangka, Gerus Citra Kemenkeu

JAKARTA, KOMPAS — Penetapan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan sebagai tersangka korupsi terjadi di tengah kebijakan efisiensi anggaran besar yang diluncurkan pemerintah. Meski secara teknis tidak banyak mengganggu pelaksanaan efisiensi, kasus tersebut bisa turut menggerus citra Kementerian Keuangan.

"Belum ada untuk sekarang. Nanti ditunggu saja ya, segera nanti akan ada. Pada intinya kami di Kemenkeu menghormati proses hukum yang sedang berjalan," ujar Dirjen Anggaran.

Menurut peneliti Sekretariat Layanan Informasi Kemenkeu Devi Setiawati, pemastian pilhan akan segera menjadi pengujian. Terlebih, saat ini Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sedang mengembun pelaksanaan efisiensi, kasus tersebut menimbulkan pertanyaan.

BADAN PENYANGGA PANGAN

Mayjen Novi Helmy Jadi Dirut Bulog

JAKARTA, KOMPAS — Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menunjuk Mayor Jenderal Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Novi menggantikan Wahyu Suparyono yang sebelumnya menjabat sebagai direktur utama sejak 10 September 2024 atau menjabat tak sampai lima bulan lamanya.

Manajer Hubungan Masyarakat Perum Bulog Andrew R. Shubah, saat dihubungi, Sabtu (8/2/2025), di Jakarta, membenarkan bahwa Direktur Utama Bulog saat ini adalah perwira tinggi TNI aktif. Utamanya soal masa jabatan Novi sebagai Direktur Utama Bulog, ia tidak menjawab lugas.

"Untuk masa pengisian (sebagai) Direktur Utama Bulog ditentukan dalam dasar sesuai pengisian dari Kementerian BUMN," ujarnya.

Bulog serap gabah dan beras 3 juta ton

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dalam rapat koordinasi telah disepakati bahwa Bulog harus menyerap gabah dan beras sebanyak 3 juta ton setara beras hingga April 2025. Hal itu mengingat produksi beras nasional, terutama pada Januari-Maret 2025, meningkat signifikan dibandingkan dengan periode sama 2024.

Bulog juga diwajibkan membeli gabah kering panen di tingkat petani sesuai harga pembelian pemerintah, yakni Rp 6.500 per kilogram. Ini guna menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani, terutama saat panen raya," katanya melalui siaran pers.

Ketika masih menjabat Dirut Perum Bulog, Wahyu Suparyono pernah menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan sejumlah badan usaha milik negara terkait pangan di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Saat itu Wahyu Suparyono mengatakan, Bulog bakal membeli dua sumber daya untuk pengadaan 3 juta ton beras yang ditargetkan pemerintah. Bulog masih dapat meminjam dana dari bank-bank milik negara senilai Rp 3 triliun dengan mekanisme subsidi bunga pinjaman.

Selain itu, Bulog juga bakal mendapat suntikan dana dari Operator Investasi Pemerintah (OIP) senilai Rp 16,6 triliun. Saat ini, Bulog tengah membahas proses penceraian dengan Kementerian Keuangan. "Beberapa waktu lalu, saya dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke rumah dinayanya. Presiden memberitahu bahwa Bulog akan mendapat suntikan dana dari OIP," ujar Wahyu, seperti dikutip Kompas.id (5/2/2025).

OIP merupakan lembaga atau badan hukum yang ditunjuk menteri keuangan untuk melaksanakan fungsi operasional insentif pemerintah. Investasi pemerintah ini bisa berupa penempatan dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Wahyu juga menyatakan, Bulog telah memiliki sejumlah strategi untuk mencapai target pengadaan 3 juta ton beras. Bulog telah memiliki 1.294 mitra kami yang tersebar di sejumlah sentra beras di Indonesia.

Bulog juga bakal menyerap gabah kering panen petani yang terdampak dalam program Makmur yang dikelola Kementerian BUMN (APB).

Teras Maliboro 1



Wisatawan berkunjung ke Teras Maliboro 1 di kawasan wisata Jalan Maliboro, Yogyakarta, Minggu (9/2/2025). Teras Maliboro 1 dibangun, antara lain, untuk memancing para pelancong yang sebelumnya berjalannya di trotoar Jalan Maliboro.

Advertisement for PT ANAM Tbk. It includes the company logo, name, and contact information for the Tender Unit. The text mentions that ANAM has a wide range of products and services, and is currently accepting tenders for various projects.